



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KARSENA
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 97452

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.352.000.000**

1. Tanah Seluas 1.251 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m²/70 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/150 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah Seluas 10.000 m² di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000
5. Tanah Seluas 68 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **278.250.000**

1. LAINNYA, POLYGON MONARCH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. LAINNYA, ODESSY SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX 155 VVA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000



5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
20.750.000
6. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 89.550.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.700.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.722.500.000

III. HUTANG Rp. 275.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.447.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.